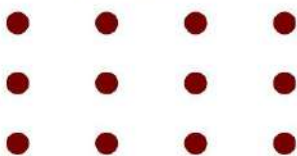




LKJIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		vii
KATA PENGANTAR		viii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang		1
B Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		1
C Isu-isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		3
D Struktur Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		3
E Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		5
F Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		8
G Sistematika Penulisan		10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		12
B Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		14

C Perjanjian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	21
D Instrumen Pendukung Capaian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	23
B Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	38
C Inovasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	44
D Penghargaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	47

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	49
B Rekomendasi	49

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025	Lamp.
2 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025	Lamp.
3 Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025	Lamp.
4 <i>Cascading</i> Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025	Lamp.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Isu-isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	3
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	6
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	6
Tabel 1.4 Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	7
Tabel 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja (Renstra Tahun 2021-2026)	18
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja (Renstra Tahun 2025-2029)	19
Tabel 2.3 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Renstra Tahun 2021-2026)	19
Tabel 2.4 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Renstra Tahun 2025-2029)	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	21
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	23
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)	24
Tabel 3.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	25
Tabel 3.4 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)	25
Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu	

	dan Beberapa Tahun Terakhir, Minimal 3 Tahun (Renstra Tahun 2021-2026)	26
Tabel 3.6	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Minimal 3 Tahun (Renstra Tahun 2025-2029)	27
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2021-2026)	28
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2025-2029)	28
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Renstra Tahun 2021-2026)	29
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Renstra Tahun 2025-2029)	29
Tabel 3.11	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Renstra Tahun 2021-2026)	30
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Renstra Tahun 2025-2029)	31
Tabel 3.13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra Tahun 2021-2026)	32
Tabel 3.14	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025-2029)	34
Tabel 3.15	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Renstra Tahun 2021-2026)	35
Tabel 3.16	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Renstra Tahun 2025-2029)	35
Tabel 3.17	Laporan Realisasi Keuangan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Laporan Realisasi Keuangan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal s.d. Bulan Desember 2025	38

Tabel 3.18	Laporan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Tahun 2025		43
Tabel 3.19	Penghargaan - Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal di Tahun 2025		47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik, dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Kendal, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810522 200501 1 010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Gaya perubahan mendasar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dilakukan inisiasi melalui reformasi birokrasi yang dijadikan sebagai tonggak bagi pemerintahan untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Sasaran reformasi birokrasi diantaranya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dimana sasaran-sasaran pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap hingga diharapkan menghasilkan *governance* yang berkualitas.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan bersifat radikal dan revolusioner. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan reformasi birokrasi diharapkan menjadi pendukung utama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi delapan aspek manajemen pemerintahan, yang salah satunya adalah tata laksana yang di dalamnya meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dukungan terhadap proses pencapaian prinsip-prinsip *good governance* adalah dengan membangun sebuah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam sebuah peta proses bisnis hubungan mandat kinerja. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk

mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi perangkat daerah.

Sumber daya manusia dan penilaian kinerja untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintahan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

C. Isu-isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Dari hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Isu-isu strategis disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Isu-isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

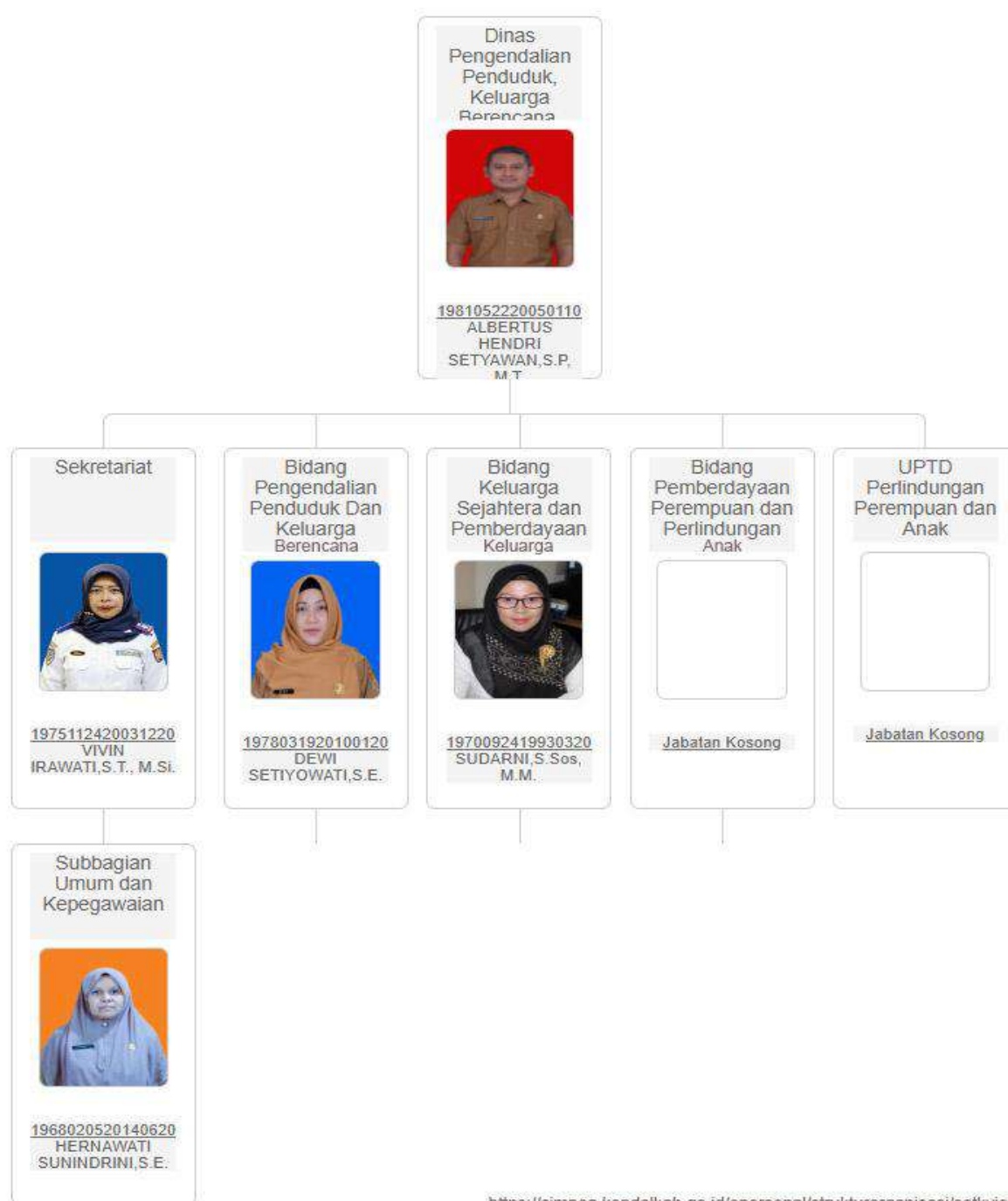
No.	Isu – Isu Strategis	Bidang Urusan
1	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 dengan rasio sebesar 6,56 per 100.000 penduduk perempuan dan masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2025 sebesar 0,013 %.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber-KB dan kurangnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB (2,82%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), hingga tahun 2025 baru 11 Sekolah yang sudah mengintegrasikan SSK dalam kurikulum mata pelajaran.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Isu – Isu Strategis	Bidang Urusan
4	Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi stunting tahun 2025 adalah 12,06 %	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Struktur Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal Tahun 2025



<https://simpeg.kendalkab.go.id/epersonal/strukturorganisasi/sofkview>

E. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kendal sebanyak 86 orang yang disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	2 Orang
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5	Ketua Tim Kerja	4 Orang
6	Pelaksana	9 Orang
7	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)	35 Orang
8	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	8 Orang
9	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	11 Orang
10	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	9 Orang
11	Tenaga Kebersihan	5 Orang
TOTAL		86 Orang

b. Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai sarana prasarana yang disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	TANAH	3	Lokasi	
2	PERALATAN DAN MESIN	2181		
	1. Alat Angkutan			
	– Mitsubishi L300	1	Unit	Baik
	– Mitsubishi Strada	1	Unit	Baik
	– Toyota Avanza	1	Unit	Kurang Baik
	– Toyota Kijang Innova	2	Unit	Baik
	– Hiace Mobil Angkutan Akseptor KB	1	Unit	Baik
	2. Sepeda Motor Honda Supra 125	44	Unit	Kurang Baik
	3. Sepeda Motor Yamaha Jupiter	41	Unit	Baik
	4. Handphone Samsung Tab S2	55	Buah	Kurang Baik
	5. Alat Kedokteran	695	Buah	Baik

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	6. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	1321	Buah	Baik
	7. Peralatan Studio	19	Buah	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	40		
	1. Mushola	1	Gedung	Baik
	2. Perkerasan Halaman Kantor	1	Bangunan	Baik
	3. Pagar	5	Bangunan	Baik
	4. Gedung Balai Penyuluhan KB	20	Gedung	Baik
	5. Gedung Alat dan Obat Kontrasepsi (Gudang)	1	Gedung	Baik
	6. Baliho	7	Bangunan	Baik
	7. Garasi Mobil	1	Bangunan	Baik
	8. Garasi Motor	1	Bangunan	Baik
	9. Tempat Parkir Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kendal	1	Bangunan	Baik
	10. Kanopi Parkir Balai Penyuluhan KB Kecamatan Limbangan	1	Bangunan	Baik
	11. Paving Balai Penyuluhan KB Kecamatan Limbangan	1	Bangunan	Baik
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	7		
	1. Instalasi Listrik	1	Instalasi	Baik
	2. Jaringan Telepon	1	Instalasi	Baik
	3. Jalan Khusus Komplek	4	Buah	Baik
	4. Bangunan Pembuang Air (Saluran Pembuang)	1	Bangunan	Baik

c. Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah Rp 22.343.383.721 dengan rincian program anggaran disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal Tahun 2025

Kode rek.	Uraian program	Anggaran
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.106.933.005
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	217.044.000
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	242.980.000
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27.640.000
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	65.000.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	102.032.667

Kode rek.	Uraian program	Anggaran
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	271.540.150
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	585.619.000
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.254.494.899
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.470.100.000
JUMLAH TOTAL		22.343.383.721

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
1	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. <i>Crosscutting</i> merupakan indentifikasi kemungkinan adanya <i>outcome</i> antara yang menjadi kinerja organisasi lain. Instansi pemerintahan perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak hanya terkait pada satu bidang/urusan saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan satuan kerja lain maupun bidang lain untuk menangani <i>outcome</i> atau kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian <i>outcome</i> final. Jika hal ini ditemukan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan <i>crosscutting</i> sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. <i>Crosscutting</i> merupakan indentifikasi kemungkinan adanya <i>outcome</i> antara yang menjadi kinerja organisasi lain. Instansi pemerintahan perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak hanya terkait pada satu bidang/urusan saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan satuan kerja lain maupun bidang lain untuk menangani <i>outcome</i> atau kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian <i>outcome</i> final. Jika hal ini ditemukan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari pohon kinerjanya. Namun demikian perlu mengidentifikasi dan memadai kondisi tersebut untuk

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
	antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari pohon kinerjanya. Namun demikian perlu mengidentifikasi dan memadai kondisi tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut;	selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut;
2	Informasi efisiensi atas penggunaan anggaran agar disertai analisis/ keterangan atas adanya efisiensi tersebut;	Informasi efisiensi atas penggunaan anggaran agar disertai analisis/ keterangan atas adanya efisiensi tersebut;
3	Pimpinan perangkat daerah agar senantiasa melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja disetiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan;	Pimpinan perangkat daerah agar senantiasa melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja disetiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan; Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan; melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan, dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah di tetapkan; Telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian internal beserta dokumentasinya, sebagaimana terlampir.
4	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar selalu dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Kendal secara berkala; dan	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar selalu dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Kendal secara berkala; DP2KBP2PA telah melaksanakan update dan input capaian kinerja secara berkala melalui SIEVA (Sistem Evaluasi Kinerja) setiap triwulan, sebagaimana terlampir dengan alamat: https://sieva-kendal.simda.net
5	Senantiasa meningkatkan kapasitas	Senantiasa meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia

No.	Saran / rekomendasi	Tindak lanjut
	lembaga dan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui online maupun tatap muka, untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan.	melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui online maupun tatap muka, untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan; Telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan baik melalui online/zoom meeting maupun class meeting untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkelanjutan melalui SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), dengan alamat: https://simpeg.kendalkab.go.id, sebagaimana terlampir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

Memuat Halaman Judul.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, Isu-isu Strategis, Struktur Organisasi, Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Anggaran, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Inovasi dan

Penghargaan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

LAMPIRAN

Memuat informasi tambahan atau bukti pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

1. Visi Bupati Kendal

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 sesuai periode RPJMD Kabupaten Kendal sebagai berikut:

a. Visi Bupati Kendal Periode Tahun 2021-2026

Visi Bupati Kendal Tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

- 1) Handal, yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- 2) Unggul, adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
- 3) Makmur, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
- 4) Berkeadilan, memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

b. Visi Bupati Kendal Periode Tahun 2025-2029

Visi Bupati Kendal Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi

pencapaiannya.

- 1) Maju, terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal diiringi dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang handal.
- 2) Sejahtera, Makmur dan Adil, terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas.
- 3) Lestari, dan Berkelanjutan, terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Misi Bupati Kendal

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi pembangunan serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa mendatang, maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, ditetapkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Misi Bupati Kendal Periode Tahun 2021-2026

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran

dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. Industri, yaitu dengan
 - 1) Penyebaran dan pemerataan industri;
 - 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
 - 3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri;
 - 4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.
 - b. Pariwisata, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - 4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.
 - c. UMKM, yaitu dengan
 - 1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
 - 2) Inkubasi usaha;
 - 3) Peningkatan daya saing UMKM.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

- a. SDM Unggul
 - 1) Membangun peran lebih pendidikan untuk mendorong wajib belajar 12 tahun;
 - 2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
 - 3) Membangun ruang belajar informal dimasyarakat; dan

- 4) Mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
- b. Daya Saing
 - 1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM Berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.
- c. Revolusi Industri 4.0
 - 1) Peningkatan penguasaan teknologi;
 - 2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran *online*.
- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan.

Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

- a. Inklusif
 - 1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis;
 - 2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.
- b. Makmur/Kesejahteraan
 - 1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal;
 - 2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.
- c. Kelembagaan
 - 1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama;
 - 2) Mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam pembangunan Kabupaten Kendal.

- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan

- 1) Mendorong penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat pedesaan;
- 2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*; dan
- 3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur.

b. Berkelanjutan

- 1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
- 2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. *e-Government*

- 1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
- 2) Mendorong optimalisasi *e-Planning*, *e-Monitoring*, *e-Musrenbang*, *e-Services*, *e-Budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b. Partisipatif

Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit

pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c. *Good Governance*

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsensus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.

b. Misi Bupati Kendal Periode Tahun 2025-2029

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2) Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif

Misi ini bertujuan untuk reformasi birokrasi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

3) Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.

4) Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat

Misi ini bertujuan untuk sektor perikanan dan pertanian yang merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan

melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

5) Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas

Misi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
(Renstra Tahun 2021-2026)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Target Kinerja/ Sasaran Tahun Ke-						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,85	92,95	93,05	93,10	93,20	93,30	93,40	
		2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	
		3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak (KLA) dan perlindungan anak khusus	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,96	20	20	20	20	20	20	
2	Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	4. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	
			5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	65	69	69	70	70	71	71	
			6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,77	15	14	13	12	11	10	

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
(Renstra Tahun 2025-2029)

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Isu Strategis
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Pembangunan Keluarga melalui Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Terkendalinya Jumlah Penduduk serta Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dalam Pembangunan	Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,17 - 63,20	63,92 - 63,98	64,68 - 64,76	65,43 - 65,54	66,18 - 66,32	66,93 - 67,10	Tren kependudukan Kabupaten Kendal mengarah pada kondisi kependudukan yang perlahan menua atau <i>Aging Population</i>
				Total Fertility Rate (TFR)	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,09	
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	90,56	90,86	91,16	91,46	91,76	92,06	
			Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	8,02	7,82	7,64	7,48	7,32	7,17	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kendal
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,34	94,35	94,36	94,37	94,38	94,39	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,26	73,36	73,46	73,56	73,66	73,76	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,194 - 0,186	0,192 - 0,178	0,191 - 0,17	0,189 - 0,162	0,188 - 0,154	0,186 - 0,146	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,3	64,35	64,4	64,45	64,5	64,55	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,19	77,24	77,24	77,29	77,29	77,34	
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,24	64,14	65,04	65,94	66,84	66,95	

B. Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Strategi dan arah kebijakan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan kedepan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.3 dan 2.4.

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
(Renstra Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	Peningkatan kesertaan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus	Memberikan, memenuhi, dan menjalin pelayanan dasar dan kesehatan serta mampu meningkatkan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak		

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak (KLA) dan perlindungan anak khusus	kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan Anak khusus	kesejahteraan
4	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur (PUS)	Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	

Tabel 2.4
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
(Renstra Tahun 2025-2029)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	1. Peningkatan peserta KB aktif, capaian peserta KB Baru, peserta KB pria, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta menurunkan <i>drop out (DO)</i> dan <i>Unmet Need</i>, dengan membuka akses dan kualitas pelayanan KB, serta Kesehatan Reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah dan terpencil. 2. Peningkatan kemandirian ber-KB, KIE KB dan Kesehatan Reproduksi. 3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA. 4. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta pengayoman pada lansia.	1. Meningkatkan peserta KB aktif, capaian peserta KB baru, peserta KB pria, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta menurunkan putus pakai (<i>drop out/DO</i>) dan <i>Unmet Need</i>, dengan membuka akses dan kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi Keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah dan terpencil. 2. Meningkatkan jaminan serta kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi pemenuhan hak-hak reproduksi bagi semua individu, remaja dan keluarga serta menyediakan pelayanan KB bagi penduduk miskin. 3. Meningkatkan upaya pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Program Panca Bina dan pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dan ketrampilan usaha bagi kelompok UPPKA. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1. Memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. 3. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan	1. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis. 2. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan. 3. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak. 4. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor.

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO. 4. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor.	

C. Perjanjian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai Perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Perlindungan Anak Khusus	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,85	93,05	93,10	93,20	93,30	93,40
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100.000 penduduk perempuan Indeks	20	20	20	20	20	20
4. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	%	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	69	69	70	70	71	71
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	15	14	13	12	11	10

NO	Program	Anggaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	217.044.000	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Persentase Anak korban kekerasan	92,85 100	93,05 100	93,10 100	93,20 100	93,30 100	93,40 100
2	Perlindungan	242.980.000							

NO	Program	Anggaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perempuan		yang ditangani instansi terkait						
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	27.640.000	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	20	20	20	20	20
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	65.000.000							
5	Pemenuhan Hak Anak	102.032.667							
6	Perlindungan Khusus Anak	271.540.150	4. TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
7	Pengendalian Penduduk	585.619.000	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	69	69	70	70	71	71
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.254.494.899							
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.470.100.000							
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.106.933.005	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15	14	13	12	11	10
Total		22.343.383.721							

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah *Government Resources Management System* (GRMS) Kabupaten Kendal, GRMS adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah Kabupaten Kendal. Sistem aplikasi yang terdiri atas Sistem Informasi Perangkat Daerah RI (SIPD RI), Sistem Informasi Perangkat Daerah Kemendagri (SIPD Kemendagri), Sistem Informasi Pengendalian Operasional (SIMPOK), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), Monitoring dan evaluasi (e-monev), Renja PD, Renstra PD dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Muara dalam sistem ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal terpilih. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian kerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 ada 3 (tiga) aspek yang akan di bahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

A Capaian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Skala nilai peringkat Kinerja sebagai berikut:

- a. Sangat baik : > 100%
- b. Baik : 85 - 100%
- c. Cukup : 65 - 84,99%
- d. Kurang : 50 - 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

Capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian %	
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,30	94,34*	101,11	93,40
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100
2. Meningkatnya Penanganan kasus						

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian %	
3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	20	6,56	304,87	20
	4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Indeks	2,20	2,00	110,00	2,2
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	71	69,60	98,03	71
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11	5,18	212,36	10

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian %	
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,17-63,70	70,50	111,60	66,93-67,10
	2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Nilai	2,04	2,00	98,03	2,09
	3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Nilai	90,56	95,10	105,01	92,06
2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	8,02	6,56	122,25	7,17
	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,34	94,34*	100,00	94,39
	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,26	73,16*	99,86	73,76
	7. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,194-0,186	0,198*	97,97	0,186-0,146
	8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,30	71,44*	111,10	64,55
	9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,19	74,32*	96,28	77,34
	10. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,24	67,22*	106,29	66,95

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dan Kementerian PPPA, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Menyajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian %		
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	94,34*	101,11	Sangat Baik	RPJMD dan BPS
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	RPJMD dan sieva
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	6,56	304,87	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,20	2,00	110	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	71	69,60	98,03	Baik	RPJMD dan sieva
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	11	5,18	212,36	Sangat Baik	RPJMD dan sieva

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian %		
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,17-63,70	70,50	111,60	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,04	2,00	98,03	Baik	RPJMD dan sieva
	3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	90,56	95,10	105,01	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	8,02	6,56	122,25	Sangat Baik	RPJMD dan sieva
	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,34	94,34*	100,00	Baik	RPJMD dan BPS
	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,26	73,16*	99,86	Baik	RPJMD dan BPS
	7. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,194-0,186	0,198*	97,97	Baik	RPJMD dan BPS
	8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,30	71,44*	111,10	Sangat Baik	RPJMD sieva
	9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,19	74,32*	96,28	Baik	RPJMD dan sieva

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian %		
	10. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,24	67,22*	106,29	Sangat Baik	RPJMD dan sieva

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.5 dan 3.6.

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Minimal 3 Tahun (Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,05	93,79	101	93,10	93,79	101	93,20	94,29	101	93,30	94,34*	101,11
	2. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	10,42	192	20	8,03	249	20	4,90	408	20	6,56	304,87
	4. Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,14	107	2,3	1,9997	115	2,2	2,03	108	2,20	2,00	110
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	69	66,19	96	70	68,9	98	70	70,52	101	71	69,60	98,03
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14	17,44	80	13	12,27	106	12	7,22	166	11	5,18	212,36

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.6
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Minimal 3 Tahun
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB 2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,17-63,70	70,50	111,60
	2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,3	2,14	107	2,3	1,9997	115	2,2	2,03	108	2,04	2,00	98,03
	3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi										90,56	95,10	105,01
	4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	10,42	192	20	8,03	249	20	4,90	408	8,02	6,56	122,25
	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,05	93,79	101	93,10	93,79	101	93,20	94,29	101	94,34	94,34*	100
	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	73,16*	99,86
	7. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,194-0,186	0,198*	97,97
	8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,30	71,44*	111,10
	9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,19	74,32*	96,28
	10. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,24	67,22*	106,29

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.7 dan 3.8.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Perangkat Daerah
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan Anak. 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101,11	93,40	Sangat Baik
	2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	Baik
	3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000)	304,87	20	Sangat Baik
	4.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	110	2,2	Sangat Baik
	5.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	98,03	71	Baik
	6.	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	212,36	10	Sangat Baik

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Perangkat Daerah
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB 2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	111,60	66,93-67,10	Sangat Baik
	2.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	98,03	2,09	Baik
	3.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	105,01	92,06	Sangat Baik
	4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	122,25	7,17	Sangat Baik
	5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	94,39	Baik
	6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,86	73,76	Baik
	7.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	97,97	0,186-0,146	Baik
	8.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	111,10	64,55	Sangat Baik
	9.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	96,28	77,34	Baik
	10.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	106,29	66,95	Sangat Baik

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.9 dan 3.10.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian %
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,29*	91,85*	102,66
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	Tidak ada	-
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,56	Tidak ada	-
	4	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,00	2,12	106,00
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	69,60	60,80	114,47
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	5,18	13,40	258,68

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian %
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB 2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	70,50	67,30	104,75
	2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,00	2,12	106,00
	3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	95,10	84,70	112,27
	4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	6,56	Tidak ada	-
	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,34*	91,85*	102,71
	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,16*	77,62*	94,25
	7. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,198*	0,421*	212,63
	8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,44*	71,02*	100,59

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian %
	9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	74,32*	80,32*	92,52
	10. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	67,22*	68,87*	97,60

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Badan Pusat Statistik Indonesia sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.11 dan 3.12.

Tabel 3.11
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan (Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 %	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus. 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	94,29*	101,11	Sangat Baik	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunana
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	Baik	Melakukan penanganan komprehensif bagi anak: perlindungan cepat (penjangkauan, rumah aman), rehabilitasi medis dan psikososial (trauma healing), pendampingan hukum, serta pemulihan hingga reintegrasi sosial, termasuk layanan pengaduan
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	6,56	304,87	Sangat Baik	Melakukan penanganan komprehensif bagi perempuan: perlindungan cepat (penjangkauan, rumah aman), rehabilitasi medis dan psikososial (trauma healing), pendampingan hukum, serta pemulihan hingga reintegrasi sosial, termasuk layanan pengaduan
	4	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,20	2,00	110	Sangat Baik	Pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala kegiatan yang telah berjalan
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	71	69,60	98,03	Baik	Memberikan Advokasi dan KIE kepada PUS untuk beralih menggunakan alat kontrasepsi modern
	6	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak	11	5,18	212,36	Sangat Baik	Memberikan Avokasi dan KIE pada masyarakat melalui berbagai Media untuk ber-KB

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 %	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		terpenuhi (<i>unmet need</i>)					

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.12
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 %	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,17-63,70	70,50	111,60	Sangat Baik	1. Optimalisasi program Bangga Kencana (BKB, BKR, BKL). 2. Pendampingan keluarga berisiko secara berkelanjutan. 3. Peningkatan edukasi pengasuhan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. 4. Penguatan ekonomi keluarga melalui UPPKA/UMKM. 5. Pencegahan stunting, pernikahan usia anak, dan kekerasan dalam keluarga. 6. Sinergi lintas sektor dan penguatan peran kader. 7. Pemanfaatan data keluarga untuk intervensi tepat sasaran.
	2	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,04	2,00	98,03	Baik	1. Melaksanakan edukasi dan advokasi tentang Program Keluarga Berencana & akses kontrasepsi 2. Melakukan sosialisasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi 3. Penyebaran KIE tentang penundaan usia perkawinan
	3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	90,56	95,10	105,01	Sangat Baik	1. Melakukan peningkatan akses & ketersediaan alat kontrasepsi 2. Memberikan penguatan pelayanan KB di fasilitas pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	8,02	6,56	122,25	Sangat Baik	Melakukan penanganan komprehensif bagi perempuan: perlindungan cepat (penjangkauan, rumah aman), rehabilitasi medis dan psikososial (trauma healing), pendampingan hukum, serta pemulihan hingga reintegrasi sosial, termasuk layanan pengaduan
	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,34	94,34*	100,00	Baik	1. Pengembangan ekonomi produktif berbasis rumah tangga dan komunitas perempuan. 2. Mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja. 3. Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
	6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,26	73,16*	99,86	Baik	1. Peningkatan partisipasi perempuan di politik & kepemimpinan

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 %	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
							2. Penguatan kapasitas & keterampilan perempuan 3. Memberikan dukungan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender
	7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,194-0,186	0,198*	97,97	Baik	1. Peningkatan akses pendidikan & kesehatan bagi perempuan 2. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik & kepemimpinan 3. Penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
	8	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,30	71,44*	111,10	Sangat Baik	1. Penguatan perlindungan hukum anak 2. Pencegahan kekerasan & eksploitasi anak 3. Peningkatan akses pendidikan & kesehatan
	9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,19	74,32*	96,28	Baik	1. Layanan perlindungan khusus & rehabilitasi 2. Penguatan sistem rujukan & pendampingan 3. Koordinasi lintas sektor (pemerintah – masyarakat)
	10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,24	67,22*	106,29	Sangat Baik	1. Peningkatan akses pendidikan & kesehatan anak 2. Pemenuhan gizi & kesejahteraan anak 3. Perlindungan dari kekerasan & diskriminasi 4. Peningkatan peran keluarga & masyarakat

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Kemendukbangga/BKKBN Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.13 dan 3.14.

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA. 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan Anak. 3. Meningkatnya	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,30	94,29*	101,11	Sangat Baik	926.236.817	826.390.109	89.22	10,78
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	Baik				
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	/100.000 penduduk	20	6,56	304,87	Sangat Baik				

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.	(per 100.000 penduduk perempuan)	perempuan								
1. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Indeks	2,20	2,00	110	Sangat Baik	16.310.213.899	15.909.479.024	97,54	2,46
	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	%	71	69,60	98,03	Baik				
	6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11	5,18	212,36	Sangat Baik				

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

Tabel 3.14
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB.	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,17-63,70	70,50	111,60	Sangat Baik	16.310.213.899	15.909.479.024	97,54	2,46
	2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Nilai	2,04	2,00	98,03	Baik				
	3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Nilai	90,56	95,10	105,01	Sangat Baik				
1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	4. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	8,02	6,56	122,25	Sangat Baik	926.236.817	826.390.109	89,22	10,78
	5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,34	94,34*	100,00	Baik				
	6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,26	73,16*	99,86	Baik				
	7. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,194-0,186	0,198*	97,97	Baik				
	8. Indeks Perlindungan	Indeks	64,30	71,44*	111,10	Sangat Baik				

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
							Pagu	Realisasi	%	
	Anak (IPA)									
	9. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,19	74,32*	96,28	Baik				
	10. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,24	67,22*	106,29	Sangat Baik				

* Realisasi Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, sehingga masih menggunakan data realisasi Tahun 2024.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.15 dan 3.16.

Tabel 3.15
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
(Renstra Tahun 2021-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	101,11	Menunjang
2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan Anak.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	Menunjang
3. Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	304,87	Menunjang
4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	110	Menunjang
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	98,03	Menunjang
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	212,36	Menunjang

Berdasarkan Tabel 3.15, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal pada tahun 2025 secara umum telah menunjang pencapaian pernyataan kinerja. Seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian dengan kategori *menunjang*, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sesuai sasaran Renstra 2021–2026.

Pada sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 101,11% serta penanganan 100% anak korban kekerasan menunjukkan optimalnya peran kelembagaan PUG dan PUHA serta sistem penanganan kasus. Sementara itu, rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang relatif tinggi mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat dan efektivitas mekanisme pelaporan yang didukung oleh program perlindungan perempuan dan anak.

Pada sasaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana, capaian TFR sebesar 110%, mCPR sebesar 98,03%, serta indikator unmet need yang tetap dikategorikan menunjang menunjukkan bahwa program KB telah berjalan efektif dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Secara keseluruhan, capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas program dan kebijakan pada periode berikutnya.

Tabel 3.16
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
(Renstra Tahun 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1. Meningkatnya angka kepesertaan ber-KB.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	111,60	Menunjang
	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	98,03	Menunjang
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	105,01	Menunjang
2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	122,25	Menunjang
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,00	Menunjang
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,86	Menunjang
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	97,97	Menunjang
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	111,10	Menunjang
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	96,28	Menunjang
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	106,29	Menunjang

Berdasarkan Tabel 3.16, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 secara umum telah menunjang pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Hal ini

ditunjukkan oleh capaian seluruh indikator kinerja yang berada pada kategori menunjang, dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran meningkatnya angka kepesertaan ber-KB, kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tercapai sebesar 111,60%, yang mencerminkan efektivitas program pembangunan keluarga. Total Fertility Rate (TFR) tercapai sebesar 98,03%, menunjukkan pengendalian angka kelahiran berjalan sesuai arah kebijakan, sedangkan Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi mencapai 105,01%, yang mengindikasikan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana. Seluruh indikator pada sasaran ini dinilai telah menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, capaian indikator kinerja juga menunjukkan hasil yang positif. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, mencapai 122,25%, yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan, penanganan, serta penguatan sistem perlindungan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercapai 100,00%, menandakan kesetaraan gender dalam pembangunan telah sesuai target. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masing-masing mencapai 99,86% dan 97,97%, yang menunjukkan upaya pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender telah berjalan optimal.

Indikator perlindungan dan pemenuhan hak anak juga menunjukkan kinerja yang baik. Indeks Perlindungan Anak (IPA) mencapai 111,10% dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 106,29%, yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak. Sementara itu, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mencapai 96,28%, yang meskipun belum melampaui target, tetap berada pada kategori menunjang dan menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara

efektif dan selaras dengan sasaran strategis, serta mampu mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Hasil ini menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus melakukan penguatan pada indikator yang masih memerlukan peningkatan pada tahun selanjutnya.

B Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Laporan Realisasi Keuangan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Laporan Realisasi Keuangan
DP2KBP2PA Kabupaten Kendal s.d. Bulan Desember 2025

NO	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d. Desember 2025	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.033.169.822	5.476.167.632	557.002.190	90,77
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.106.933.005	4.649.777.523	457.155.482	91,05
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.489.044	42.009.150	4.479.894	90,36
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.900.000	100.000	99,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.489.044	12.109.150	4.379.894	73,44
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.679.358.647	3.352.400.497	326.958.150	91,11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.679.358.647	3.352.400.497	326.958.150	91,11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.500.000	49.800.000	1.700.000	96,70
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.500.000	49.800.000	1.700.000	96,70
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.667.381	281.176.220	28.491.161	90,80
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000	21.145.160	454.840	97,89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.500.000	15.383.300	116.700	99,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.676.259	5.057.800	3.618.459	58,29
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.835.122	239.274.960	21.560.162	91,73
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.056.000	315.000	2.741.000	10,31
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.948.933	534.612.739	92.336.194	85,27
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.999.955	150.667.688	45.332.267	76,87
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.704.978	55.616.860	88.118	99,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.744.000	325.828.191	46.915.809	87,41

NO	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d. Desember 2025	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.969.000	389.778.917	3.190.083	99,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.469.000	88.740.917	1.728.083	98,09
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	298.538.000	1.462.000	99,51
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	217.044.000	206.038.700	11.005.300	94,93
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	27.484.000	24.291.480	3.192.520	88,38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	16.684.000	16.291.480	392.520	97,65
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	10.800.000	8.000.000	2.800.000	74,07
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.940.000	12.649.858	1.290.142	90,75
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	13.940.000	12.649.858	1.290.142	90,75
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.620.000	169.097.362	6.522.638	96,29
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.920.000	25.680.000	240.000	99,07
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.500.000	31.076.573	2.423.427	92,77
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.200.000	112.340.789	3.859.211	96,68
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	242.980.000	205.626.623	37.353.377	84,63
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	41.890.000	8.860.000	82,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	41.890.000	8.860.000	82,54
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.720.000	121.436.623	22.283.377	84,50
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.400.000	22.000.000	4.400.000	83,33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.250.000	2.221.623	28.377	98,74
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.070.000	97.215.000	17.855.000	84,48
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.510.000	42.300.000	6.210.000	87,20

NO	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d. Desember 2025	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.510.000	33.800.000	710.000	97,94
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.000.000	8.500.000	5.500.000	60,71
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27.640.000	27.069.850	570.150	97,94
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.640.000	27.069.850	570.150	97,94
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13.390.000	13.020.000	370.000	97,24
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.250.000	14.049.850	200.150	98,60
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	65.000.000	64.047.000	953.000	98,53
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.047.000	953.000	98,53
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	64.047.000	953.000	98,53
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	102.032.667	98.388.437	3.644.230	96,43
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	98.432.667	96.489.521	1.943.146	98,03
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	87.732.667	86.198.446	1.534.221	98,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.700.000	10.291.075	408.925	96,18
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.600.000	1.898.916	1.701.084	52,75
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.600.000	1.898.916	1.701.084	52,75
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	271.540.150	225.219.499	46.320.651	82,94
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	43.592.740	7.157.260	85,90
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.750.000	43.592.740	7.157.260	85,90
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.280.150	147.904.150	38.376.000	79,40
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.210.150	62.010.150	9.200.000	87,08
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.070.000	85.894.000	29.176.000	74,64
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	33.722.609	787.391	97,72

NO	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d. Desember 2025	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	33.722.609	787.391	97,72
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN	16.310.213.899	15.909.479.024	400.734.875	97,54
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	585.619.000	570.054.278	15.564.722	97,34
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	64.810.000	59.383.800	5.426.200	91,63
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	46.710.000	42.384.000	4.326.000	90,74
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	18.100.000	16.999.800	1.100.200	93,92
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	520.809.000	510.670.478	10.138.522	98,05
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	154.809.000	152.120.086	2.688.914	98,26
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	150.000.000	144.639.898	5.360.102	96,43
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	213.910.494	2.089.506	99,03
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.254.494.899	9.923.600.359	330.894.540	96,77
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.813.412.591	1.687.016.061	126.396.530	93,03
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.180.800.000	1.070.290.525	110.509.475	90,64
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	206.000.000	201.569.216	4.430.784	97,85
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	198.812.591	195.506.270	3.306.321	98,34
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.800.000	24.330.050	3.469.950	87,52
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	195.320.000	4.680.000	97,66
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.067.644.049	3.975.693.507	91.950.542	97,74
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.072.500.000	1.072.389.800	110.200	99,99
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.146.642.400	1.146.265.000	377.400	99,97
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.848.501.649	1.757.038.707	91.462.942	95,05
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.002.194.000	3.890.517.020	111.676.980	97,21
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.400.000	52.858.000	6.542.000	88,99
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.850.094.000	3.745.059.020	105.034.980	97,27
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	92.700.000	92.600.000	100.000	99,89

NO	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d. Desember 2025	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi dalam bentuk (%)
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	371.244.259	370.373.771	870.488	99,77
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	40.859.800	40.389.471	470.329	98,85
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	24.982.459	24.922.300	60.159	99,76
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	305.402.000	305.062.000	340.000	99,89
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.470.100.000	5.415.824.387	54.275.613	99,01
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	289.100.000	242.384.860	46.715.140	83,84
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	19.885.366	8.914.634	69,05
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	197.000.000	161.843.994	35.156.006	82,15
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	58.500.000	56.455.500	2.044.500	96,51
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4.800.000	4.200.000	600.000	87,50
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.181.000.000	5.173.439.527	7.560.473	99,85
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.355.000.000	2.355.000.000	0	100,00
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.826.000.000	2.818.439.527	7.560.473	99,73
TOTAL		22.343.383.721	21.385.646.656	957.737.065	95,71

Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mendapatkan Anggaran sebesar: Rp. 22.343.383.721 dari Sumber Anggaran DAU Reguler, DAU Khusus Pendidikan, DAU Khusus Pendidikan, BOKB/DAK Non Fisik, DAK Non Fisik PPPA DAK Fisik, dan DIF (Dana Insentif Fiskal) sampai dengan semester II 2025 terealisasi sebanyak Rp. 21.385.646.656 (95,71%), dengan rincian berdasarkan sumber anggaran disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Laporan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Tahun 2025

NO	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)
1	DAU REGULER	6.507.417.155	6.020.551.352	92,52
2	DAU KHUSUS PENDIDIKAN	341.552.667	327.699.608	95,94
3	DAU KHUSUS KESEHATAN	132.609.850	128.270.444	96,73
4	BOKB	11.654.500.000	11.405.972.196	97,87
5	DAK NON FISIK PPPA	400.660.000	336.114.349	83,89
6	DAK FISIK	3.248.501.649	3.109.038.707	95,71
7	DIF (Dana Insentif Fiskal)	58.142.400	58.000.000	99,76
TOTAL		22.343.383.721	21.385.646.656	95,71

C Inovasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2025 berikut:

1. Safari Pelayanan KB

- Safari dilaksanakan setiap bulan.
- Pelayanan berupa KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa IUD, Implan, Metode Operasi Pria (MOP), dan Metode Operasi Wanita (MOW).
- Pelayanan KB bekerja sama dengan 78 fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Praktek Mandiri Bidan.
- Pelayanan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, dan KB pasca persalinan.
- Pelayanan berupa pemasangan alat kontrasepsi, tes lab gula darah, dan tes lab kehamilan, diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya.
- Akseptor KB IUD dan Implan mendapatkan fasilitas uang transport, snack dan makan besar.
- Akseptor KB MOP dan MOW mendapatkan fasilitas uang transport Rp 100.000, snack dan makan besar, pengganti uang tidak bekerja untuk KB MOW Rp 450.000 dan KB MOP sebesar Rp. 900.000.
- Bagi akseptor KB yang mengalami kegagalan/komplikasi mendapatkan fasilitas pengayoman.

2. GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)

- Gerakan dimaksud merupakan gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat serta tidak stunting melalui kepedulian berbagai pihak untuk memberikan bantuan sebagai orang tua asuh.
- Dikuatkan dengan SE Bupati Kendal Nomor 1.147 Tahun 2025 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kabupaten Kendal.
- Tujuan utamanya adalah:
 - a. Membantu keluarga berisiko stunting mendapatkan gizi cukup dan sanitasi layak.

- b. Menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat.
- c. Mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting melalui gotong royong.

3. Rekomendasi Pernikahan Dini melalui Puspaga

- Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga yaitu bentuk layanan untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling bagi keluarga.
- Puspaga telah memberikan pelayanan berupa informasi, edukasi, dan konseling bagi anak beserta keluarga yang mengajukan pernikahan dini.
- Puspaga memberikan rekomendasi pernikahan dini sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi pernikahan dini.
- Rekomendasi didasarkan pada hasil konseling dan tes psikologis terhadap anak yang mengajukan pernikahan dini.

4. Industri Rumahan

- Industri Rumahan adalah industri skala rumah tangga yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
- Kegiatan berupa perintisan industri rumahan baru, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengolahan produk, pelatihan pengemasan, dan fasilitasi perizinan usaha.

5. Layanan Cepat Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Via *Whatsapp*

- Inovasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan dengan cepat, aman, dan mudah. Pengaduan bisa disampaikan setiap saat melalui *Whatsapp* dan direspon tidak lebih dari 1 x 24 jam.
- Nomor *Whatsapp* 0895 6367 82811.

6. GITAR MELODI (Akselerasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Sinergitas Pentahelix untuk Rujukan, Kampanye, Konseling, dan Edukasi)

- Gitar Melodi merupakan mempercepat pencegahan pernikahan dini melalui kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan masyarakat), Inovasi ini menjadi strategi akseleratif berbasis kolaborasi untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas generasi muda di Kabupaten Kendal

- Program ini menghadirkan layanan terpadu yang meliputi:
 - 1) Rujukan, Fasilitasi penanganan remaja atau keluarga berisiko melalui asesmen awal, penghubungan ke instansi terkait, serta koordinasi dan pemantauan tindak lanjut layanan;
 - 2) Kampanye, Penyebarluasan informasi secara terstruktur melalui sosialisasi, media sosial, media massa, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang bahaya pernikahan dini;
 - 3) Konseling, Pendampingan psikologis dan sosial bagi remaja serta keluarga untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, penguatan mental, dan pencegahan pernikahan dini; dan
 - 4) Edukasi, Peningkatan pengetahuan tentang dampak dan risiko pernikahan dini melalui pembelajaran, penyuluhan, dan penguatan kapasitas remaja serta orang tua agar siap merencanakan masa depan yang lebih baik.

7. Rumah Aman KARTIKA

- Rumah Aman KARTIKA adalah inovasi layanan terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal yang berfungsi sebagai pusat perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi perempuan, anak, serta keluarga rentan. Inovasi ini hadir untuk menjawab persoalan perceraian, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja migran bermasalah, serta stunting melalui sistem layanan terintegrasi lintas sektor.
- KARTIKA merupakan akronim dari Keluarga Amanah, Rukun, Tangguh, Inspiratif, penuh Kasih, dan Adaptif, yang mencerminkan komitmen membangun keluarga harmonis, kuat, peduli, dan adaptif dalam menghadapi tantangan kehidupan.
- Visi Rumah Aman KARTIKA adalah mewujudkan keluarga yang berketahanan melalui perlindungan, pendampingan, serta pemberdayaan yang berkelanjutan kepada perempuan dan anak. Tujuannya meliputi penyediaan perlindungan yang aman bagi korban, pemberian layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial secara terpadu, penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah perceraian dan pernikahan dini, peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas perangkat

daerah dan lembaga terkait.

- Dalam pelaksanaannya, Rumah Aman KARTIKA terdiri atas beberapa divisi utama, yaitu:
 - 1) Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani pengaduan, asesmen, pendampingan, dan rujukan korban kekerasan;
 - 2) Divisi Perlindungan Perempuan Pekerja Migran yang memberikan penanganan apabila ada pekerja migran yang mengalami kasus kekerasan dan memberikan pemberdayaan bagi eks pekerja migran agar meningkatkan ekonomi;
 - 3) Divisi Peningkatan Ketahanan Keluarga yang berfokus pada edukasi, konseling, dan penguatan fungsi keluarga;
 - 4) Divisi Percepatan Penurunan Stunting yang mengoordinasikan identifikasi dan intervensi keluarga berisiko; dan
 - 5) Divisi Pengamanan yang bertugas memastikan keamanan fisik dan nonfisik di lingkungan Rumah Aman, memberikan perlindungan kepada penerima layanan, serta mendukung situasi yang aman dan kondusif dalam setiap proses pendampingan dan rehabilitasi.

D Penghargaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Penghargaan yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal di Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19

Penghargaan - Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal di Tahun 2025

NO	JUDUL PRESTASI	OPD	KETERANGAN	PENGHARGAAN DARI
1.	Kelompok KB Pria , Juara III	DP2KBP2PA Kab. Kendal	Juara III Perwakilan	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
2.	Kabupaten Layak Anak Tahun 2025	DP2KBP2PA Kab. Kendal	Predikat Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Standarisasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA)	TPA/Daycare Cerdas Sukorejo - Kendal	Predikat Nindya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JUDUL PRESTASI	OPD	KETERANGAN	PENGHARGAAN DARI
4.	Satuan Pendidikan Ramah Anak	SMA N 1 Kendal	Terstandar Satuan Pendidikan Ramah Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	<i>Stakeholder</i> yang Peduli Berkontribusi Aktif Terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	DP2KBP2PA Kab. Kendal	<i>Stakeholder</i> yang Peduli dan dan Berkontribusi Aktif	Pemerintah Kabupaten Kendal
6.	Penerima Penghargaan Istimewa Kategori Unit Pengumpul Zakaqt (UPZ) OPD Terbaik Kabupaten Kendal	DP2KBP2PA Kab. Kendal	Predikat Terbaik	Baznas Kabupaten Kendal

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Kendal merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena beberapa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dan beberapa target belum dapat dicapai, harapan kami di tahun-tahun selanjutnya seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

B REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Sosialisasi program kepada semua penyuluh KB dan *stakeholders*;
2. Pembaharuan Surat Keputusan (SK) Forum Anak dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
3. Peningkatan kapasitas kepada *stakeholder* terkait dalam penanganan isu-isu di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Penyusunan strategi daerah dalam perwujudan ketahanan keluarga yang melibatkan lintas sektor dan jejaring PUG;
5. Peningkatan kualitas layanan penanganan korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan);

6. Pembinaan rutin dan koordinasi Petugas Lapangan dan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Kendal
7. Mengoptimalkan kerja sama mitra terkait;
8. Koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait, Tingkat Kabupaten/Provinsi dan Pusat;
9. Permohonan alat kontrasepsi ke pusat sesuai kebutuhan masyarakat;
10. Pemberian layanan kesehatan reproduksi dan penggantian jasa pelayanan pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan melalui Fasyankes yang teregistrasi pada K/0 KB;
11. Memberikan tambahan uang pengganti tidak bekerja pada akseptor MOP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Kendal, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal


ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19810522 200501 1 010

LAMPIRAN